

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengembangan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Secara Umum

Menurut Mukaromah (2018, hlm 38) menerangkan bahwa pengembangan masyarakat (*community development*) secara bahasa Arab disebut sebagai *tathwirul mujtama il-islamiy* yang artinya bentuk aktivitas pengembangan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dilaksanakan teratur, tersistematis, terencana dan adanya arahan guna memperlebar akses warga atau masyarakat dalam mewujudkan kondisi sosial, ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik apabila dibandingkan dengan program pembangunan sebelumnya.

Pengembangan masyarakat atau *community development* Menurut Chirstensen dan Robinson (1980) dalam buku Ferdian, (2015, hlm. 32) mereka memandang *community development* sebagai suatu “ *a group of people working together in a community setting on a shared decision to initiate a process to change their economic, social, cultural or enivronmental situation* “ diterjemahkan ke bahasa Indonesia “ sekelompok orang bekerja sama dalam lingkungan masyarakat tentang keputusan bersama untuk menyusun proses untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan mereka. Selanjutnya Sanders (1958) dalam Ferdian (2015, hlm. 33) menunjukkan pengembangan masyarakat bisa dilihat sebagai suatu proses, metode, program atau gerakan. Pandangan tersebut, sebagai suatu “proses” dalam gerakan dalam tahap-tahap dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap berikutnya, yaitu mencangkup kemajuan dan adanya perubahan dalam artian kriteria terspesifikasi.

Selanjutnya pandangan suatu “metode” adalah merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan melalui cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapau tujuan yang akan dicapai. Metode-metode lain misalnya perubahan dilakukan pemerintah, perubahasan menggunakan beberapa imbalan dan perubahan melalui

pendidikan dapat menjadi pelengkap bagi metode pengembangan masyarakat yang melakukan tahapan yang di sarankan dalam proses guna upaya keinginan pengguna metode (pemerintahan pusat, swasta badan atau masyarakat lokal itu sendiri dapat dilaksanakan).

Metode pengembangan masyarakat dinyatakan sebagai suatu prosedur dan isinya menyatakan sebagai suatu daftar kegiatan. Melaksanakan prosedur, kegiatan-kegiatan dianggap dilaksanakan apabila program sangat difomrlitaskan seperti dalam rencana lima tahunan fokusnya cenderung melihat pada program dan tidak pada sesuatu yang telah terjadi pada masyarakat yang terlibat dalam program. Sebagai salah satu program seperti ini pengembangan masyarakat memiliki ketertarikan dengan bidang-bidang subjek yang khas seperti kesehatan, kesejahteraan, pertanian, industri dan rekreasi. Dengan demikian, fokusnya terdapat pada kegiatan-kegiatan dan pandangan pada suatu gerakan pengembangan masyarakat sebagai gerakan cenderung melembaga dan membangun struktur organisasinya sendiri, menerima prosedur dan praktisi-praktisi profesional berfokus pada mendorong gagasan-gagasan pengembangan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Irwin T Sanders dalam Syarifuddin (2016, hlm. 28) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat (*community development*) yaitu dua aspek yang memiliki kekuatan dalam masyarakat. Kekuatan yang pertama yakni pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dan kekuatan yang kedua ialah pembangunan ekonomi (*economic development*).

Community development merupakan kumpulan masyarakat dalam pemaknaan yang luas, artinya dengan wadah organisasi atau pengelompokan dalam masyarakat, warga masyarakat melakukan suatu proses kegiatan mengidentifikasi masalah/kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya, membuat suatu prioritas yang akan dilakukan, menyadarkan pada diri masing-masing dengan keyakinan kuat untuk mengerjakan pekerjaan mencapai tujuan itu, mencari sumber yang diperlukan dan melaksanakan kegiatan atas dasar kerjasama antara warga masyarakat. Bila dapat dirumuskan pandangan Irwin T Sanders terhadap *community development* yaitu CD =

SO/CO + ED artinya CD adalah *community development*, SO/CO adalah *social organization / community organization* dan ED adalah *economic development*.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip merupakan penjabaran dari pandangan ekologi dan keadilan sosial. Prinsip dasar pengembangan masyarakat telah muncul dalam berbagai diskusi, mulai dari pandangan ekologi sampai pandangan pentingnya keadilan sosial sebagai mendasari pengembangan.

Seperangkat prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang digunakan dalam pendekatan pembangunan prakek kerja disuatu lingkungan komunitas. Selanjutnya, Ife (1995) dalam Ferdian (2015, hlm. 49) menjelaskan ada 22 prinsip dalam pengembangan masyarakat terdiri dari : (1) Pembangunan terpadu (*Integrated Development*) (2) Konfrontasi dengan kebatilan struktural (*confronting structural disadvantage*) (3) Hak asasi manusia (*human rights*) (4) Keberlanjutan (*sustainability*) (5) Pemberdayaan (*empowerment*) (6) Pribadi dan politik (*the personal and the political*) (7) Kepemilikan komunitas (*community ownership*) (8) Kemandirian (*self-reliance*) (9) Ketidaktergantungan pada pemerintahan (*independence from the state*) (10) Tujuan dan visi (*immediate goals and ultimate vision*) (11) Pembangunan bersifat organik (*organic development*) (12) Kecepatan gerak pembangunan (*the pace of development*) (13) Keahlian pihak luar (*external expertise*) (14) Membangun komunitas (*community building*) (15) Proses dan hasilnya (*process and outcome*) (16) Keterpaduan proses (*the integrity of the process*) (17) Tanpa kekerasan (*non-violence*) (18) Inklusif (*inclusiveness*) (19) Konsensus (*consensus*) (20) Kerja sama (*co-operation*) (21) Partisipasi (*participation*) (22) Mendefinisikan kebutuhan (*defining need*).

Pada prinsip diatas, pengembangan masyarakat tersebut bagi *community workers*, hal yang terpenting adalah sampai sejauh mana mampu membuat hubungan diantara prinsip-prinsip tersebut serta tidak berfiks secara terpisah dari struktur dan proses mengingat pengertian tentang pengembangan masyarakat ini memiliki tujuan dalam mengembangkan tingkat taraf hidup dan cakupan seluruh

komunitas. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah pembangunan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas.

2.1.1.3 Model dan Strategi Pengembangan Masyarakat

Menurut Ayub M. Pangandaran dalam Mukaromah (2018, hlm. 43) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat atau (*community development*) berlandaskan dari dua pandangan, pertama berpandangan secara profesional yang terpacu kepada usaha meningkatkan perilaku mandiri, sedangkan berpandangan radikal yang berfokus pada pengupayaan merubah ketidakseimbangan dan menganalisa sumber ketertindasan. Selanjutnya, menurut Domineli dan Mayo dalam buku Ayub Pangandaran menyebutkan ada enam model pengembangan masyarakat terdiri dari :

- a. Model perawatan masyarakat seperti mengadakan suatu aktivitas dalam program voluntir guna dapat membantu meringankan kesenjangan legalitas.
- b. Model pengeorganisasian masyarakat yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat guna melaksanakan evaluasi hubungan bersama lembaga lain yang menangani kesejahteraan sosial.
- c. Model pembangunan masyarakat ini memberikan bentuk perhatian untuk meningkatkan potensi atau keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat.
- d. Model aksi masyarakat yakni kegiatan yang memiliki tujuan membangkitkan kelompok-kelompok masyarakat lemah guna meningkatkan kemampuan
- e. Model gender adalah kegiatan yang bertujuan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan
- f. Model anti rasisme adalah kegiatan yang memperjuangkan kesamaan dan kesempatan antar berbagai ras dan etnik

Selanjutnya, pendapat menurut Jack Rothman dikutip oleh Edi Suharto dalam Mukaromah (2018, hlm. 44) menjelaskan bahwa model pengembangan masyarakat yang sering dilaksanakan dilapangan ada tiga macam terdiri dari:

- a. Pengembangan masyarakat lokal atau *locality development* merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan sebagai klien yang bermasalah namun sebagai masyarakat yang memiliki keunikan dan potensi yang dapat dikembangkan sepenuhnya. Inti dari pengembangan masyarakat adalah dapat mengembangkan pemimpin lokal, meningkatkan strategi kemandirian, informasi, interaksi, relasi, dan keterlibatan keanggotaan masyarakat. Model ini lebih fokus pada tujuan proses daripada hasil.
- b. Perencanaan sosial (*social planning*) model ini berorientasi pada penugasan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan dan memecahkan masalah. Hal tersebut, bukanlah menjadi prioritas karena mengambil keputusan dilakukan oleh pekerja sosial pada lembaga formal seperti lembaga pemerintahan atau swasta yakni LSM. Pekerja komunitas memiliki tugas melakukan penelitian, menganalisa masalah, menidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan evaluasi program pelayanan kemanusiaan.
- c. Aksi sosial (*social action*) mendasari model ini yang memiliki pandangan bahwa masyarakat merupakan sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Masyarakat dikumpulkan melalui proses penyadaran dan tindakan-tindakan aksi nyata guna dapat mengubah struktur kekuasaan agar memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Model ini berfokus pada proses dan hasil.

Pengembangan masyarakat dapat dianalogikan sebagai suatu proses yang tersistematis dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam setiap kegiatan aksi sosialnya. Pencapaian target dan pencapaian tujuan-tujuan pengembangan masyarakat perlu adanya strategi guna dapat tepat sasaran dengan demikian, efektifitas perencanaan pengembangan masyarakat dapat terukur. Menurut Morris dan Binstock

dalam Ferdian (2015, hlm. 60) menjelaskan ada tiga strategi dalam perencanaan dan aksi pengembangan masyarakat yakni :

- a. Merubah paradigma dalam pola sikap, pola fikir, perilaku dan pendidikan
- b. Merubah kondisi sosial melalui merombak kebijakan-kebijakan organisasi formal
- c. Mereformasi aturan dan sistem fungsional masyarakat

2.1.1.4 Model Penta Helix dalam Pengembangan Masyarakat

Pada dasarnya pengembangan masyarakat ini membutuhkan beberapa pihak yang terkait untuk mewujudkan tujuan bersama-sama serta memperkuat hubungan satu sama lain yang nantinya sebagai modal relasi jangka panjang. Menurut Zuhail dalam Rozikin (2019, hlm. 52) *penta helix* merupakan konsep yang berkembang dari *triple helix* untuk melihat terobosan baru sebagai hasil dari hubungan kerja antara akademik, bisnis dan pemerintah. Akademik memiliki peranan dalam pemasok keilmuan lalu dari pihak industri atau bisnis berfokus dari produksi menjadi pemanfaat keilmuan tersebut serta pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan interkasi stabil antara pemasok dan pemanfaat keilmuan.

Sedangkan menurut Slamet dalam jurnal Rozikin (2019, hlm 52) menjelaskan ada beberapa pendapat tentang lima faktor dalam model *pentahelix* yaitu *academican, business, community, goverment* dan *media* yang biasa disingkat ABCGM. Hal utama dalam keberhasilan inovasi ini yaitu terbentuknya sinergi dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan. Model *pentahelix* ini berguna dalam mengelola kompleksitas berbasis aktor.

- a. Akademisi

Menurut Muhyi dkk dalam Putri (2019, hlm. 21) menjelaskan bahwa akademisi merupakan sumber pengetahuan yang memiliki konsep dalam mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kompetitif yang berkelanjutan Selanjutnya menurut Halibas et.al dalam Putri (2019, hlm 21) memaparkan peran akademisi sebagai berikut :

1. Diskusi akademik memiliki keutamaan yang berfokus pada inovasi guna melakukan komersialisasi dan kemitraan dengan sektor publik dan swasta
2. Bertanggung jawab dalam mengembangkan keterampilan kerja, keretampilan inovatif, kewirausahaan dan giat sebagai bagian dari nilai-nilai inti organisasi.
3. Istansi akademik memiliki fungsi sebagai standarisasi dalam penelitian dan pengembangan destinasi.
4. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikam sertifikasi terhadap penelitian.

b. *Bisnis*

Menurut Sunaryo dalam Putri (2019, hlm. 22) menerangkan bahwa dari pihak tertentu yakni pihak industri dan swasta harus dapat memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan persediaan permodalan, membuka kegiatan atau program baru sehingga dapat menawarkan peluang usaha baru untuk masyarakat luas.

Selanjutnya, menurut Anwar dalam Putri (2019, hlm. 22) sektor swasta juga dapat memainkan peran penting dalam persiapan ruang kegiatan dan produk meskipun lebih fokus pada pengembangan yang berorientasi kepada keuntungan. Terlihat dari keterlibatan dalam ruang (sebagian besar sektor swasta mencurahkan penelitian pada pengembangan yang berlandaskan suprastruktur dan lokasi yang sesuai).

c. *Government* / Pemerintah

Menurut Asshiddiqie dalam Abdullah (2016, hlm 85) memaparkan bahwa pemerintah merupakan pemangku jabatan pemerintahan guna dapat menjalankan wewenang dan kekuasaan. Penggunaan kata *government* dalam bahasa Inggris juga dapat menimbulkan kesalahfahaman banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut memiliki dua arti yang berbeda yaitu arti luas dan arti sempit.

d. *Community*

Menurut Hermanto dalam Putri (2019, hlm 23) komunitas lokal merupakan komunitas yang tinggal pada wilayah yang sama dan pada saat ini komunitas

lokal tidak lagi sebagai kelompok yang homogen, bahkan komunitas lokal ini pun hampir selalu bersifat heterogen sebagaimana yang dapat difahami dalam realita sosial.

e. Media

Menurut Hernanda dkk dalam Putri (2019, hlm. 24) media dalam *penta helix* memiliki peran untuk katalisator (*brand image and brand awareness*). Selanjutnya Muyhi dalam Putri (2019, hlm. 24) media sebagai pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk dapat mengembangkan bisnis dan penting dalam memperkenalkan bisnis.

2.1.1.5 Tahapan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat memiliki beberapa tahapan untuk pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Menurut Ayub (2011, hlm.11) menerangkan ada tiga tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kondisi masyarakat dapat berdaya guna mengembangkan dirinya sendiri. Tiga tahap tersebut terdiri dari :

a. Tahap Penyadaran

Tahap ini masyarakat diberikan pencerahan dan dorongan atau memotivasi untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak yang mempunyai kapasitas dan menikmati hal-hal yang lebih baik

b. Tahap Pengkapasitasan/Kemampuan

Setelah tahap penyadaran dilakukan, selanjutnya pada tahap ini masyarakat diberikan seperti pengetahuan, fasilitas, organisasi dan sistem nilai aturan main.

c. Tahap Pendayaan

Tahap ini merupakan memberikan kesempatan untuk masyarakat atau haknya guna menggunakan pengetahuan dan potensinya yang telah mereka miliki, sehingga dapat mengurus dan mengembangkan dirinya sendiri.

Adapun pendapat lain perihal tahapan pengembangan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Adi dalam Istimror (2016, hlm. 44) bahwa ada beberapa tahapan pengembangan masyarakat terdiri dari :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini terdiri dari dua persiapan yaitu (a) persiapan petugas dan (b) persiapan lapangan dibawah ini penjelasan dari masing-masing persiapan :

(a) perispan petugas

Persiapan petugas ini adalah tenaga *community worker* mempersiapkan petugas-petugas untuk dapat menyamakan pandangan atau persepsi antara anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pedekatan apa yang akan dipilih dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Apabila proses pegembangan masyarakat tenaga petugas yang dipilih itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan lainnya.

(b) Perisapan lapangan

Petugas dari *community development* tentunya melakukan penyiapan lapangan. Pada tahap awal dilakukan studi kelayakan terhadap wilayah yang menjadi sasaran baik dilaksanakan secara formal atau informal serta tahap ini terjadi kontrak dan kesepakatan awal dengan sasaran yang akan dituju, kesepakatan awal ini wajib ditingaklanjutin agar menemukan jalan atau kesepakatan untuk keterdekatan anatara *community worker* sebagai pelaku perubahan dengan kelompok sasaran. Fase inilah disebut sebagai proses dari pemberdayaan masyarakat.

b. Tahap Assesment

Tahap assesment adalah mengindetifikasi masalah yang artinya segala kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) ataupun kebutuhan yang dapat diekspresikan (*expressed needs*) dan sumber daya dimiliki komunitas (masyarakat) sasaran. Pada proses penilaian *assesment* dapat menggunakan teknik SWOT terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weekness*), kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Masyarakat akan dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Adakalanya suatu lingkungan masyarakat tidak merasakan sesuatu hal sebagai kebutuhan mereka, akan tetapi *community worker* memandang bahwa kondiri tersebut perlu adanya perbaikan.

c. Tahap Perencanaan Alternatif program

Pelaku *community worker* secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat sasaran untuk berfikir mengenai masalah yang mereka sedang hadapi dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Program dan kegiatan yang akan mereka kembangkan tentunya wajib disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan, sehingga tidak akan muncul program atau kegiatan yang bersifat insidental (*one shot programme*) atau *charity* (amal) yang kurang dapat ditinjau kemanfaatnya dalam jangka panjang

d. Tahap Performulasian Rencana Aksi

Tahap ini pelaku perubahan atau *community worker* membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasa diperlukan bila masyarakat mempunyai berbagai permasalahan usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga *community worker* yang menjadi fasilitator membantu mereka untuk menentukan arah program yang mana akan mereka prioritaskan.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena apabila rencana yang telah disusun dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan jika tidak ada kerjasama antara *community worker* dan warga masyarakat sasaran. Upaya pelaksanaan program pengembangan masyarakat, peran masyarakat itu sebagai kader yang diharapkan dapat konsistensi dan menjaga program yang telah dikembangkan.

f. Tahap Evaluasi Program dan Hasil Perubahan

Pada tahap ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya melibatkan warga karena keterlibatan warga pada tahap evaluasi ini diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat membantuk suatu dimasyarakat lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pelaku perubahan atau *community worker* menyadari bahwa tolak ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang telah terjadi. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses dan juga hasil serta dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah diharapkan terjadi.

Evaluasi yang dilakukan *community worker* bersama masyarakat sasaran bukan saja untuk mengevaluasi hasil proses pengembangan masyarakat, namun juga dilakukan untuk melihat proses intervensi.

g. Tahap Terminasi

Pada proses pengembangan masyarakat ini adanya tahap terminasi yaitu tahap perpisahan hubungan secara formal dengan masyarakat sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai juga tidak ada penyanggah dana yang dapat mau meneruskan program tersebut.

2.1.2 Pembinaan

2.1.2.1 Pengertian Umum Pembinaan

Menurut Mangunhardjana dalam Yuliani (2014, hlm 22) pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Sedangkan menurut Mathis dalam Muchtar (2017, hlm. 21) memaparkan bahwa pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit ataupun luas.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan

untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Usaha Kecil, 1995)

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut Ivancevich dalam Muchtar (2017, hlm. 21) mengemukakan sejumlah bulir penting yaitu pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil pekerjaannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

2.1.2.2 Tujuan Pembinaan dalam Organisasi

Menurut Risaldi (2016, hlm 517) menjelaskan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan diarahkan kepada pencapaian lima sasaran pokok, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas permasalahan yang muncul)
- b. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- c. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka
- d. Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat warga negara Republik Indonesia

- e. Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warga negara Republik.

2.1.2.3 Fungsi Pembinaan

Menurut Risaldi, (2016, hlm. 518) dalam jurnalnya fungsi pembinaan diarahkan untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan seperti :

- a. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- c. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- d. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

2.1.2.4 Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thota dalam Muchtar (2017, hlm. 22) mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu :

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan
- e. Menggunakan model “*action reseacrh*”
- f. Menggunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditunjukkan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- h. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

2.1.2.5 Strategi Pembinaan

Menurut Mintberg dalam bukunya *Strategy Making in Three Model* yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen Muchtar (2017, hlm 25) mendefinisikan tentang strategi pembinaan adalah, bahwa : “Strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana”.

Selanjutnya Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen Muchtar (2017, hlm 26) mengidentifikasikan lima ciri utama dari strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu :

a. Wawasan Waktu (*time horizon*)

Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh kedepan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya

b. Dampak (*impact*)

Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti

c. Pemutusan Upaya (*concentration of effort*)

Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

d. Pola Keputusan (*pattern decision*)

Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti pola yang konsisten

e. Peresapan

Suatu strategi mencangkup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

2.1.2.6 Teknik Pembinaan

Teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, menurut Mintberg dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam Rahmadani (2019, hlm. 2) menjelaskan ada empat cara mengenai teknik-teknik dalam pembinaan yaitu :

a. Teknik Adatif (Berliku-liku)

Teknik ini bersifat relatif dan terfragmentasi serta fleksibelitas yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu permasalahan.

b. Teknik Perencanaan (*planning strategy*)

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas dan perencanaan tingkat puncak yang mengikuti suatu prosedur sistematis dan mengharuskan menganalisis lingkungan, organisasi dan lembaga sehingga dapat mengembangkan rencana untuk bergerak ke masa depan

c. Teknik Sistematis dan Struktur

Teknik yang berdasarkan pemilihan secara rasional mengenai peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan serta disusun bergitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi

d. Teknik Inkrementalisme Logis

Teknik ini adalah teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan sasaran ke arah yang diinginkan. Teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya

2.1.3 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

2.1.3.1 Pengertian Gabungan Kelompok Tani

Organisasi menurut Kusdi dalam Hermawan (2016, hlm. 16) menjelaskan bahwa kolektivitas khusus manusia yang beraktivitas terkordinasi dan terkontrol dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, perspektif lain menyebutkan bahwa organisasi suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang dibutuhkan usaha dari banyak orang.

Dua pandangan tersebut terdapat unsur karakteristik utama dari sebuah organisasi yaitu *Purposes, People* dan *Plan* Gerloff dalam Kusdi dalam Hermawan (2016, hlm. 16) menyebutkan bahwa sesuatu tidak dapat disebut organisasi jika tidak memiliki tujuan (*purposes*), anggota (*people*), dan rencana (*plan*). Dalam aspek rencana (*plan*) ini terkandung semua ciri-ciri seperti sistem, struktur, desain, strategi, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (*people*) dalam mencapai berbagai tujuan (*purpose*) yang telah ditetapkan.

Kelompok Tani dan Gapoktan merupakan organisasi sosial yang terbentuk karena persamaan minat dan kepentingan bersama dari petani di desa. Dalam organisasi sosial terdapat proses yang Menurut UU No. 19 tahun 2013, yang termasuk dalam organisasi petani yaitu Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, asosiasi komoditas, dewan komoditas, dan kelembagaan ekonomi petani berupa BUMP. Kelompok Tani dan Gapoktan merupakan dua organisasi yang berada di lingkungan pedesaan. Selanjutnya pada tingkatan yang lebih tinggi asosiasi komoditas pertanian merupakan kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani. Cakupan wilayah untuk asosiasi komoditas pertanian ini bisa mencakup satu kabupaten atau propinsi.

Sedangkan untuk tingkatan nasional menjadi bidang cakupannya dewan komoditas pertanian nasional. Pembentukan organisasi petani seperti Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan alat utama untuk mendistribusikan bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal antara pemerintah dengan petani dan secara horizontal antar sesama petani. Organisasi petani diharapkan sebagai komponen pokok dalam pertanian yaitu berperan dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki degradasi sumber daya alam, meningkatkan ketelibatn perempuan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial politik Rita N. Suhaeti (2014, hlm. 159-160).

Selanjutnya menurut Dyah Puspita Ratna, Wurajdi, (2012, hlm. 145-146) menjelaskan Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani adalah oraganisasi yang memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap

petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Disini terlihat bahwa pembentukan Gapoktan kepada kepentingan atas yaitu sebagai kendaraan untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan dari luar desa. Saat ini Gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Syahyuti (2007) dalam jurnal Demmallino, Eymal B, Rahmadanah, (2018, hlm. 286) menambahkan bahwa Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institutions*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga–lembaga diluarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani..

2.1.3.2 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani

Undang-undang No.67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan petani menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani harus diselenggarakan pada setiap tingkat wilayah administrasi wilayah. Membina suatu gabungan kelompok tani oleh penyuluh pertanian diperoleh proses seperti :

a. Pembentukan kelompok tani

Kelompok tani terdiri dari sekumpulan masyarakat tani dengan tujuan menghasilkan produktivitas pertanian yang melimpah serta menambah tingkatan keilmuan mereka dengan adanya kegiatan penyuluhan. Pembentukan kelompok tani yang berdampak kepada kualitas belajar mereka, pengalaman dan keterampilan. Kelompok tani memiliki komoditi atau fokus dalam bertani pada bidang tertentu, karena pada setiap wilayah kelompok tani terdapat sumber daya manusia dan sumber daya alam yang begitu berdeda.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Selanjutnya Undang-undang No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar kelompok tani dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kemampuan kelompok tani dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Pada pembentukan kelompok tani adanya suatu peningkatan dan menjalankan fungsinya yang telah diatur pada Undang-Undang No.67 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kelas Belajar

Peningkatan kemampuan kelompok tani melalui proses belajar mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar
- b) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar
- c) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota
- d) Melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib
- e) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait
- f) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif
- g) Aktif dalam proses belajar-mengajar termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya
- h) Mengemukakan dan memahai keinginan, pendapat dan masalah anggota

- i) Merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan dan merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait

2. Wahana Kerjasama

Peningkatan kemampuan kelompok tani sebagai wahana kerjasama diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama
- b) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama
- c) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama
- d) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara anggota
- e) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota
- f) Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian
- g) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan
- h) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain
- i) Menjalani kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengelolaan, pemasaran hasil dan atau permodalan dan melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota

3. Unit Produksi

Peningkatan kemampuan kelompok tani sebagai unit produksi, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya

- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama serta rencana kebutuhan kelompok tani atas dasar pertimbangan efisiensi
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan,alat,cara) usaha tani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan
- d) Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani
- e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain
- f) Mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang
- g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan
- h) Mengelola administrasi secara baik dan benar

b. Keanggotaan kelompok tani

Kelompok tani akan berkembang dan maju apabila adanya suatu penumbuhan dalam kelompok tani itu tersebut. Kelompok tani juga memiliki suatu struktur organisasi dan memiliki misi dan visi masing-masing kelompok tani. Berdasarkan Undang-undang No.67 Tahun 2019 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani BAB II Poin Penumbuhan Kelompok tani yang terdiri dari sub indikator :

1. Dasar Penumbuhan Kelompok tani

- a) Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada dimasyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian didorong untuk menumbuhkan kelompok tani, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahatani.
- b) Anggota kelompok tani harus memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama

- c) Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya
- d) Kelompok tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani
- e) Kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, dan lain-lain).

2. Prinsip-Prinsip Penumbuhan Kelompok tani

Pada penumbuhan kelompok tani tentunya memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar dalam penumbuhan atau membentuk kelompok tani, berikut ini ada beberapa prinsip mengenai penumbuhan kelompok tani terdiri dari :

- a) Kebebasan, artinya menghargai setiap petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
- b) Keterbukaan, artinya kegiatan kelompok tani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
- c) Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola kelompok tani (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi);
- d) Keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian kelompok tani

- e) Kesetaraan, artinya hubungan antar pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
- f) Kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar pelaku utama dan pelaku usaha

c. Tahap-tahap pembinaan gabungan kelompok tani

1. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat tani di Desa / Kelurahan

Gabungan kelompok tani “Baktihurip” berada pada wilayah tingkat desa/kelurahan memiliki kelompok tani yang bermacam-macam komoditinya dan penyuluh pertanian sebagai pelaksana operasional di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) dengan tahap pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan berdasarkan Undang-undang No. 67 Tahun 2016 seperti berikut :

- a) Mengidentifikasi dan menginventarisasi kelembagaan petani (kelompok tani/gabungan kelompok tani) yang ada di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), termasuk kelembagaan petani yang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing subsektor
- b) Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani
- c) Melaksanakan kunjungan ke kelompok tani dan gabungan kelompok tani untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani
- d) Memfasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam melakukan indentifikasi potensi wilayah, penyusunan RDK dan RDKK, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK
- e) Menyusun program penyuluh pertanian desa/kelurahan
- f) Membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya

- g) Membantu petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya
- h) Menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota kelompok tani, dan gabungan kelompok tani untuk dibawa dalam pertemuan BP3K
- i) Melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya
- j) Menumbuh kembangkan kemampuan manajeral, kepemimpinan dan kewirausahaan anggota kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta pelaku agribisnis lainnya
- k) Memfasilitasi terbentuknya kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta pembinaannya
- l) Melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyarwarah, rembung tani, temu warga serta koordinasi penyuluhan pertanian)
- m) Melaksanakan penilaian kemampuan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
- n) Berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi petani kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kelambagaan petani
- o) Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data kelompok tani dan gabungan kelompok tani kepada pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

d. Tujuan Akhir Gabungan Kelompok Tani

Setiap gabungan kelompok tani mempunyai tujuan mengorganisir lembaga petani seperti kelompok tani yang tergabung. Tujuan akan tercapai apabila peningkatan kemampuan gabungan kelompok terlaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Menurut Hermawan (2016, hlm. 10) menjelaskan ada salah

satu ciri pada suatu kelompok ialah kesatuan sosial yang memiliki urgensi dan tujuan bersama, untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagaimana terbantu pola komunikasi yang baik antara satu sama lain serta memiliki peran yang berbeda-beda yang mampu menjalankan perannya.

Menurut Departemen Pertanian (2006) menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan dan penguatan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yakni guna memperkuat kelembagaan masyarakat tani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada masyarakat tani akan terfokus pada sasaran yang jelas lalu adapun tujuan lain dari pembentukan gabungan kelompok tani diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Gabungan kelompok tani dapat meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota baik secara materiil maupun non material sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada pengembangan organisasi Gapoktan.
- b. Gabungan kelompok tani dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia semua anggota melalui pendidikan pelatihan dan study banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.
- c. Gabungan kelompok tani dapat mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.

Kelembagaan ini berfungsi menjadi lembaga penghubung masyarakat tani dari wilayah yang berbeda juga berperan sebagai fungsi-fungsi pemenuhan permodalan, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tani. Menurut Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, gabungan kelompok tani (gapoktan) memiliki fungsi-fungsi yakni :

- a. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga);

- b. Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- c. Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan;
- d. Melakukan proses pengolahan produk para anggotanya (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- e. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/ menjual produk petani kepada pedagang/ industri hilir.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat menarik kesimpulan fungsi - fungsi dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) yaitu sebagai unit produksi guna memenuhi kebutuhan pasar, penyedia saprotan serta menyalurkan kepada masyarakat tani melalui kelompok tani masing-masing, penyedia modal usaha serta menyalurkan secara kredit atau simpan pinjam kepada para masyarakat tani bila diperlukan, melakukan proses pengolahan produk para anggotanya guna dapat meningkatkan nilai tambah dan menyelenggarakan perdangan, memasarkan atau menjual produk masyarakat tani kepada para pedang/industri hilir.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengembangan masyarakat tani melalui pembinaan gapoktan dibawah ini hasil penelitian yang revelan yaitu :

2.2.1 Rudi Hermawan, 2016. Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kulwaru Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peran gabungan kelompok tani atau gapoktan berdampak baik kesejahteraan keluarga khususnya di Desa Kulwaru Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo dengan usaha seperti pelatihan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan menambah keterampilan juga penyuluhan yang diadakan memberikan maafaat bagi petani. Gapoktan

menyediakan input usaha tani, menyediakan modal, menyediakan irigasi, menyediakan informasi, memasarkan hasil pertanian secara kolektif, Lembaga sentral yang mengatur kelompok tani, meningkatkan ketahanan pangan dan berperan mengatur perekonomian pedesaan (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan / LUEP).

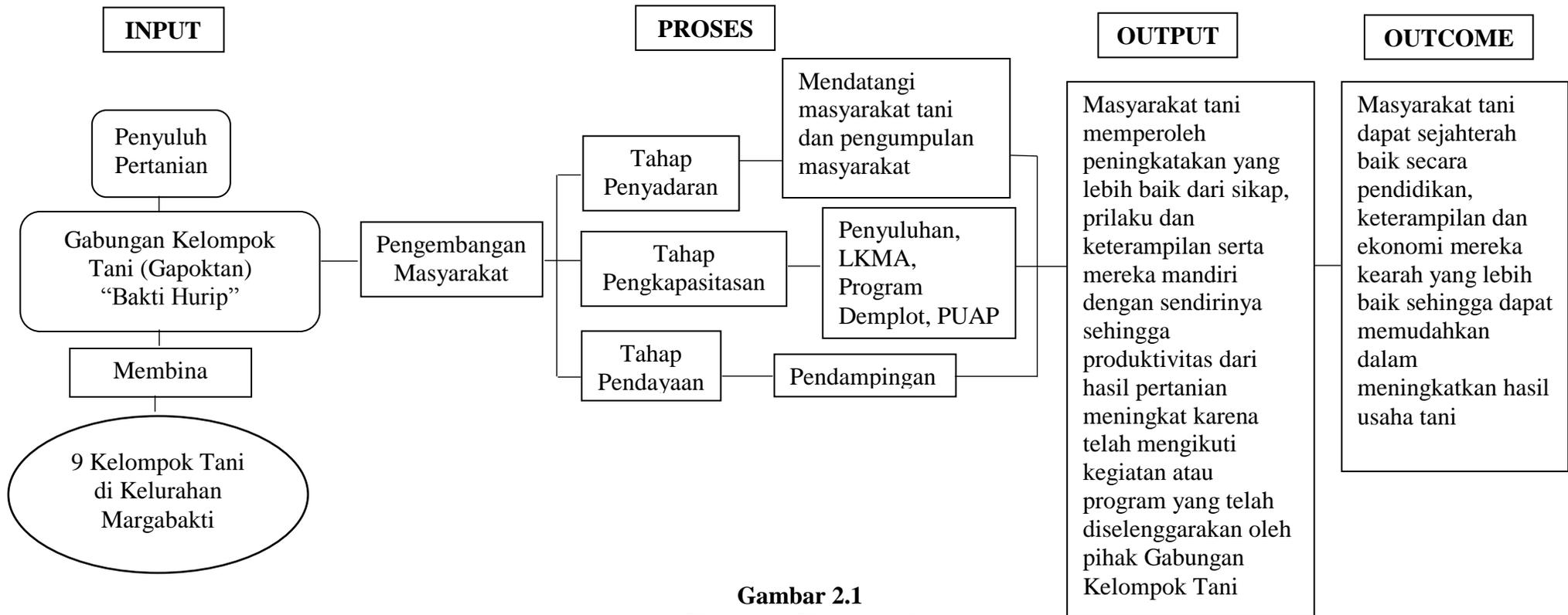
2.2.2 Tri Nurhatika Yasa, 2019. Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dalam Pemberdayaan Petani di Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dari gapoktan diantaranya sosialisasi kepada petani, memberikan fasilitas dan bahan juga sebagai pemasaran dalam melakukan pemberdayaan petani di desa tersebut. Sosialisasi dari gapoktan kepada masing-masing poktan memberikan dampak yang baik walaupun dari penghasilan tidak meningkat namun setiap ada kebutuhan para petani menjadi lebih terarah untuk disalurkan kepada yang membutuhkannya, dengan adanya akses fasilitas dan bahan yang mudah didapatkan petani juga sangat terbantu oleh keberadaannya gapoktan tersebut.

2.2.3 Arinni Abdilah, 2018. Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKM-A PUAP Gapoktan Subur telah memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa KedungJati diantaranya dibidang ekonomi, bidang sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan berupa Pemberian pinjaman modal kepada petani untuk kegiatan produksi pertanian dengan syarat mudah dan sistem yang jelas, Budidaya bibit unggul (penangkaran benih), Pengelolaan Usaha pertanian (Saprodi), Ketersediaan pupukbersubsidi, Membuat usaha olahan rumah (home industry), Kemudahan petani dalam memasarkan hasil pertanian dengan harga 10% lebih tinggi dari

harga pasaran, Pemberdayaan usaha peternakan yaitu ternak sapi, Kemudahan masyarakat di luar sektor pertanian, seperti pemberian bantuan pinjaman sosial, Memberikan bantuan kepada keluarga orang yang meninggal, sekolah-sekolah, masjid, dan pondok pesantren di wilayah Kedungjati, dan Pemberian *reward* pada nasabah yang aktif melakukan transaksi simpanan. LKM-A PUAP Gapoktan subur memiliki sistem kekeluargaan tidak membebani satu sama lain dan adanya akad yang dibenarkan oleh syariat Islam seperti *wadhiah yad damanah*.

- 2.2.4 Tria Wulandari, 2019. Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Lampung Timur Menurut Perpektif Ekonomi Islam.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan petani dari hasil program gapoktan yang telah dilaksanakan seperti adanya pertemuan rutin bersama petani, pelatihan keterampilan dan memberikan fasilitas simpan pinjam. Fasilitas simpan pinjam merupakan suatu upaya gapoktan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan memberikan dana untuk mengembangkan usaha taninya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan kualitatif.
- 2.2.5 Raras Martatian, 2017. Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Gledeg Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUAP oleh petani melalui LKMA dapat dikatakan cukup berhasil dapat dilihat dari beberapa indikator mencakup pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tangkap klien dan sistem pemeliharaan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Pada **Gambar 2.1** menunjukkan kerangka konseptual pada penelitian ini terdiridari *input*, proses, *output* dan *outcome*. *Input* dari penelitian ini yakni penyuluh pertanian, gabungan kelompok tani dan masyarakat tani. Penyuluh pertanian merupakan seorang penyuluh lapangan yang ditugaskan membina suatu wilayah melalui penyuluhan kepada masyarakat tani sekaligus mendampingi gabungan kelompok tani

Proses pengembangan masyarakat melewati 3 tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran ini selain tugas dan fungsi seorang penyuluh adapun penyuluh mendatangi masyarakat tani secara personal dengan tujuan untuk memberikan rasa kenyamanan dalam berinteraksi juga membangun hubungan baik dengan masyarakat tani. Pada dasarnya masyarakat tani itu tidak bisa secara langsung mengikuti program dan kegiatan yang telah tersedia, oleh karena itu pentingnya penyuluh harus berhubungan baik bersama masyarakat tani. Setelah tahap penyadaran, selanjutnya tahap pengkapasitasan.

Tahap pengekapasitasan ini seperti memberikan beberapa kegiatan atau program yang telah disepakati bersama yaitu penyuluhan, mendirikan LKM-A, dana bantuan PUAP dan program bantuan pembangunan fisik untuk demonstrasi plot (demplot). Masyarakat tani yang tergabung dalam kelompok tani berhak untuk mengikuti program dan kegiatan guna meningkatkan intelektulitas dan menambah keterampilan mereka dalam dunia pertanian sehingga mereka dapat membangun diri mereka agar mandiri dalam kegiatan usaha tani mereka nantinya. Adapun pengkapasitasan ini menekankan bahwa masyarakat tani harus memiliki daya tidak hanya berkebun atau bertani saja tetapi mereka belajar bagaimana sistem berorganisasi, bergotong royong, dan memperluas relasi mereka. Selanjutnya, tahap pendayaan ini penyuluh mendampingi mereka setelah melewati berbagai kegiatan dan progam yang telah terlaksanakan. Pendampingan diberikan oleh penyuluh ini seperti mensurvei usaha tani mereka apakah berjalan sesuai harapan atautkah ada permasalahan yang ada. Hakikatnya penyuluh pertanian ini mampu memberikan

solusi atas masalah yang muncul dilapangan atau hal yang tak terduga maka dari itu, kesinambungan antara masyarakat tani dengan penyuluh ini harus tetap terjaga.

Gabungan kelompok tani (gapoktan) berperan sebagai kordinator dari beberapa kelompok tani yang ada untuk memperoleh informasi, fasilitas dan sebagainya. Membina masyarakat tani oleh gabungan kelompok tani (gapoktan) tetap tidak terlepas oleh campur tangan seorang penyuluh namun penyuluh ini memberikan instruksi dari dinas pertanian daerah kepada pengurus gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk menjalankan program dan kegiatan untuk masyarakat tani agar dapat berkembang dengan semestinya.

Output dari proses pengembangan masyarakat tani yaitu memperoleh peningkatan produksi dari hasil pertanian karena telah mengikuti kegiatan atau program yang telah diselenggarakan oleh pihak Gabungan Kelompok Tani sehingga *outcome* masyarakat tani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka seperti memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari hasil tani sampai ekonomi mereka juga meningkatkan dari hasil usaha tani.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian lebih mendalam terkait pada penelitian yang tertuang dalam teknik pengumpulan data yaitu pada tahap wawancara. Pertanyaan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan pengembangan masyarakat tani melalui pembinaan gabungan kelompok tani (gapoktan)?